

HUBUNGAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA

THE CORRELATION OF CIVIC KNOWLEDGE TOWARDS POLITICAL PARTICIPATION

Nisa A'rafiyah Tri Wulandari, Umi Dayati

Program Studi Magister PPKn Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang 5, Malang

e-mail: niisa.120992@gmail.com

Abstrak: this study aims to test the correlation of civic knowledge towards political participation at Law and Civic students in Malang State University. Quantitative research with this survey design uses stratifiedproportionalrandomsampling. Theresultsshowthatthelevel of civic knowledge is intermediate, and the level of political participation is high. Hypothesis testing proves that there is a strong correlation of civic knowledge towards political participation at Law and Civic students. This strong correlation indicates that the level of civic knowledge can be one of the factors that can influence the high level of studentparticipation.

Kata Kunci: civic knowledge, student, political partisipation

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa Jurusan HKn UM. Penelitian kuantitatif dengan desain survei ini menggunakan *stratified proportional random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa jurusan HKn adalah sedang, sedangkan tingkat partisipasi politik mahasiswa jurusan HKn adalah tinggi. Uji hipotesis membuktikan bahwa ada hubungan yang kuat antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa jurusan HKn Hubungan yang kuat ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi mahasiswa.

Kata Kunci: pengetahuan kewarganegaraan, mahasiswa, partisipasi politik

PENDAHULUAN

Jenjang pendidikan tinggi memiliki peran vital dalam mengembangkan sumber daya yang memiliki keterampilan kewarganegaraan dan informasi mengenai politik sehingga mampu terlibat dalam kegiatan politik (Torney-Purta, Cabrera, Rios, Carlson, & Bridgeman, 2015). Pendidikan tinggi merupakan *epistemic community* karena di dalamnya banyak terdapat sumber daya profesional yang mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan oleh pembuatan kebijakan dalam merumuskan kebijakan baik terkait integrasi nasional maupun integrasi regional (Nulhaqim, Heryadi, Pancasilaawan,

& Fedriyansyah, 2016). Pendidikan tinggi juga berperan dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada mahasiswa (Saifulloh, 2017).

Mahasiswa sebagai warga negara yang berada di jenjang pendidikan tinggi, idealnya memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi karena warga negara yang berpendidikan tinggi dinilai lebih sadar dan aktif dalam berpartisipasi politik (Almond, 2000). Pandangan Almond ini didasarkan pada hasil penelitian Lipset yang berjudul *Political Man, The Social Bases of Politics* dan hasil penelitian Verba dan Nie yang berjudul *Political Participation in America*

yang menunjukkan bahwa warga negara yang berpendidikan tinggi, partisipasi politiknya lebih tinggi daripada warga negara yang berpendidikan rendah (Budiardjo, 1982).

Partisipasi politik memiliki ciri-ciri utama (van Deth, 2016). Pertama, partisipasi politik dipahami sebagai aktivitas atau tindakan. Kedua, partisipasi politik, bersifat sukarela dan tidak diperintahkan oleh elit penguasa atau diwajibkan berdasarkan hukum tertentu. Ketiga, partisipasi mengacu pada aktivitas seseorang sesuai dengan peran mereka sebagai nonprofesional atau amatir dalam bidang politik (bukan sebagai politisi, pegawai negeri, atau pelobi). Keempat, partisipasi politik tidak hanya menyangkut pemerintah, politik, atau negara, namun memiliki pengertian yang lebih luas dari kata-kata ini. Artinya tidak terbatas pada fase tertentu (seperti proses pengambilan keputusan parlemen atau pemilihan presiden) atau untuk tingkat atau bidang tertentu (seperti pemilihan nasional atau kontak dengan pejabat partai). Dengan demikian, setiap aktivitas sukarela, non profesional yang mengenai pemerintah, politik, atau negara adalah spesimen partisipasi politik.

Tingkat partisipasi politik sebagai salah satu wujud peran warga negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, pekerjaan masyarakat, peran aparat pemerintah, pengaruh kaum intelektual, dan konflik antar pemimpin politik (Utami, 2017). Di dalam pidatonya yang berjudul *Making the Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the 20th Century*, Branson (1999) menegaskan bahwa partisipasi yang bermutu dan tanggung jawab dalam kehidupan politik oleh warga negara adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dan untuk mewujudkan partisipasi yang demikian itu diperlukan kompetensi kewarganegaraan yang terdiri atas (1) penguasaan terhadap pengetahuan, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter, dan (4) komitmen yang benar

terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Pengetahuan kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana yang diterangkan dalam Buku Pedoman Implementasi Kurikulum 2013, memiliki keterkaitan dengan partisipasi politik warga negara. Howard menegaskan apabila dikehendaki tercapainya luaran pendidikan sebagai warga negara yang baik maka kompetensi kewarganegaraan yang terdiri atas pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) perlu diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan secara terencana sejak pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (Stokamer, 2013).

Teori-teori di atas menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik seseorang (Nugraheni, 2017). Berdasarkan fakta ilmiah tersebut, menguji hubungan pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) Universitas Negeri Malang (UM) merupakan bahasan yang menarik untuk dikaji. Mahasiswa Jurusan HKn yang memiliki karakteristik sebagaimana mahasiswa pada umumnya, dipilih atas dasar asumsi bahwa sebagian besar mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa jurusan HKn adalah mata kuliah yang erat kaitannya dengan ketatanegaraan, politik, hukum, dan ideologi yang sangat menunjang tercapainya pengetahuan kewarganegaraan yang tinggi bagi mahasiswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei. Teknik sampling yang digunakan adalah *stratified proportional random sampling* dengan alasan (1) teknik *random* lebih baik dalam menggeneralisasi dan akurasinya

lebih tepat dibandingkan teknik sampling *non random* (Suharso, 2009); (2) dengan teknik random memungkinkan untuk melakukan evaluasi secara obyektif (Supranto, 1986); (3) teknik *stratified* lebih efisien dan memberikan keterwakilan yang lebih baik (Sekaran, 2003); dan (4) teknik *proportional* memberikan kemudahan untuk mengontrol sampel (Zulganef, 2013)

Data dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 84 responden dari mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan diukur melalui lima indikator. Indikator yang pertama berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang dijabarkan ke dalam empat soal. Indikator kedua berkaitan tentang landasan sistem politik Indonesia yang diuraikan ke dalam empat soal. Indikator ketiga adalah kebijakan untuk mewujudkan tujuan negara dan prinsip demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator ini dibagi menjadi tiga soal. Indikator keempat berkenaan dengan peran Indonesia dalam kancan dunia yang dijabarkan ke dalam empat soal. Indikator kelima adalah peran warga negara dalam kehidupan demokrasi, diuraikan ke dalam tiga soal. Untuk setiap indikator nilai maksimalnya empat dan nilai minimalnya satu, sehingga total skor maksimal untuk pengetahuan kewarganegaraan adalah 20 dan skor minimalnya adalah lima.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sebelum dilakukan analisis data, dilakukan uji prasyarat untuk meyakinkan bahwa analisis regresi linear dapat diterapkan (Gunawan, 2015). Uji prasyarat yang digunakan ada tiga yaitu uji Shapiro-Wilk, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ketiga uji prasyarat ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi *SPSS 17.0 for windows*. Setelah itu dilakukan uji hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah *ada hubungan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa Jurusan HKn UM*. Pengujian

hipotesis dilakukan dengan pedoman jika nilai $r_{(hitung)} >$ dari nilai $r_{(tabel)}$ maka H_0 ditolak sedangkan jika nilai $r_{(hitung)} <$ dari nilai $r_{(tabel)}$ maka H_0 diterima (Sudijono, 2014). Atau dapat juga berpedoman pada rumusan jika nilai signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak sedangkan jika nilai signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima (Riduwan, Rusyana, & Enas, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan Kewarganegaraan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Pengetahuan kewarganegaraan memuat informasi faktual tentang hal-hal politik, antara lain lembaga dan mekanisme pemerintahan, kondisi ekonomi dan sosial yang sedang terjadi, isu-isu terkini, dan kedudukan pemimpin politik dalam isu-isu tersebut (Carpini & Keeter, 1996). Dengan kata lain, pengetahuan kewarganegaraan memuat tentang pengetahuan politik (*political knowledge*) yang didefinisikan sebagai pengetahuan dan pemahaman untuk menghasilkan aktivitas politik bagi peserta didik baik aktivitas dasar maupun aktivitas yang sesuai dengan isu terkini (Goldfinger & Presley, 2014). Lebih terperinci, pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa jurusan HKn diukur berdasarkan lima hal yaitu kehidupan bernegara, politik dan pemerintahan; landasan sistem politik; perwujudan tujuan, nilai dan prinsip demokrasi oleh pemerintah; hubungan negara dengan negara lain; dan peran warga negara dalam kehidupan demokrasi (NCES, 2011).

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap kelima hal tersebut, tampak bahwa rata-rata tingkat pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa jurusan HKn adalah *sedang*. Rata-rata ini disebabkan ada 13% mahasiswa yang memiliki nilai *rendah*, sedangkan 87% sisanya memiliki tingkat kewarganegaraan *sedang* (37 mahasiswa) dan *tinggi* (36 mahasiswa). Kesimpulan yang dapat diambil adalah mahasiswa jurusan HKn

menunjukkan kinerja akademik yang tangguh (*advance*), artinya mahasiswa telah mencapai kompetensi melebihi materi (NCES, 2011) sehingga memungkinkan mahasiswa untuk tumbuh menjadi warga negara yang baik dan cerdas dalam berpartisipasi pada masyarakat, bangsa, maupun negara (Kemenristekdikti, 2016).

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan terkait dengan rata-rata indikator pengetahuan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa terkait dengan peran warga negara adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 76. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang tinggi terkait dengan bentuk-bentuk media yang dapat digunakan sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga mempunyai pengertian yang baik terkait dengan peran warga negara yang secara disadari maupun tidak disadari dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan politik bagi masyarakat umum. Artinya peran aktif warga negara dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam rangka menegakkan sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis dalam kehidupan politik bangsa Indonesia (Kartono, 1996). Selain pengetahuan ini, ada dua pengetahuan lagi yang juga dikategorikan tinggi.

Pertama, pengetahuan tentang kehidupan politik dan pemerintahan. Pengetahuan mahasiswa tentang kehidupan politik dan pemerintahan mencakup tentang konsep sistem pemerintahan Indonesia dan sistem pembagian kekuasaan Indonesia. *Kedua*, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Tingginya hasil pengukuran menunjukkan bahwa mahasiswa dapat memahami tentang bentuk-bentuk kebijakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi, berbeda dengan ketiga pengetahuan di atas, pengetahuan mahasiswa terkait dengan

landasan sistem politik Indonesia dan peran Indonesia dalam kancah internasional termasuk ke dalam kategori sedang. Artinya, pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila dan kontribusi Indonesia dalam kancah internasional perlu ditingkatkan lagi, karena pemahaman tentang ideologi negara dan peran negara di dunia internasional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atas isu-isu yang sedang berkembang dalam suatu negara (Torney-Purta et al., 2015).

Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Politik Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Partisipasi politik mencakup setiap aktivitas sukarela, non profesional yang mengenai pemerintah, politik, atau negara (van Deth, 2016). Berbagai jenis perilaku politik yang memenuhi ciri-ciri tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi, misalnya memberikan suara, menandatangani petisi, atau mengajukan keberatan. Perilaku tersebut adalah contoh nyata dari bentuk partisipasi politik tertentu. Pada penelitian ini partisipasi politik mencakup keikutsertaan dalam pemberian suara, keikutsertaan dalam diskusi publik, dan keaktifan dalam bergabung dalam kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik mahasiswa jurusan HKn adalah *tinggi*. Dengan kata lain, mahasiswa jurusan HKn telah melakukan pekerjaan yang baik (*doing good works*). Artinya mahasiswa telah mengembangkan kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan politik dan pemahaman terkait dengan isu-isu politik (Barrett, 2012). Dapat juga disebutkan bahwa mahasiswa jurusan HKn telah memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara (*sense of civic responsibility*) dan komitmen terhadap masyarakat umum atau *commitment to public life* (NASPA & the American College Personnel Association, 2004).

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} sebesar 0.779, sedangkan untuk df 82 dengan

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Politik)

Variabel	Nilai Korelasi	Koefisien Regresi	R Square	t _{hitung}	Sig.
Konstanta		36.882		19.318	
<i>Pengetahuan Kewarganegaraan</i>	0.779	1.497	0.607	11.249	0.000

taraf signifikansi 0.05, nilai r_{tabel} adalah sebesar 0.1807, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena nilai $r_{tabel} < r_{hitung}$. Selain itu, nilai signifikansinya hanya sebesar $0.000 < 0.05$. Artinya, *ada hubungan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa Jurusan HKn*. Karena nilai korelasi sebesar 0.733 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa adalah *kuat*.

Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan kewarganegaraan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa. Maka dari itu, pengetahuan kewarganegaraan perlu ditransmisikan dengan baik kepada warga negara agar warga negara tertarik untuk melayani masyarakat (berpartisipasi secara aktif). Ketertarikan dan layanan masyarakat dipandang sebagai bahan untuk keberhasilan kehidupan demokrasi (Saltmarsh, 2005). Lebih daripada itu, untuk membangun kehidupan demokrasi yang sehat, diperlukan dua dimensi esensial yaitu (1) partisipasi politik yang didasari keinginan dan kemampuan diri sendiri warga negara untuk berpartisipasi secara efektif dan (2) pemahaman dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan proses demokrasi (Branson, 1999). Partisipasi politik sebagai salah satu dimensi esensial perlu ditanamkan kepada warga negara sejak dini, salah satunya melalui institusi pendidikan. Di Indonesia, upaya dalam menanamkan partisipasi politik kepada warga negara dimulai dari pemberlakuan kurikulum pendidikan yang di dalamnya memuat materi

Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang yang paling berhubungan dengan persiapan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan (Hilburn & Maguth, 2014). Pencapaian hasil yang optimal dalam mempersiapkan warga negara yang proaktif dan bertanggung jawab, dilakukan dengan mewajibkan peserta didik di Indonesia untuk mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sampai ke tataran perguruan tinggi. Peserta didik yang belajar tentang bagaimana berkomitmen dan berpartisipasi untuk demokrasi di perguruan tinggi akan mampu membuat transformasi karena dapat mendefinisikan pembelajaran kewarganegaraan sebagai pembelajaran dan pengembangan kemampuan untuk partisipasi yang lebih efektif melalui proses menimba pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui kegiatan perkuliahan yang fokus terhadap demokrasi masyarakat (Saltmarsh, 2005).

SIMPULAN

Penelitian yang bertujuan menguji hubungan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi mahasiswa ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, tingkat pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa jurusan HKn adalah *sedang*. Kedua, tingkat partisipasi politik adalah *tinggi*. Ketiga, nilai r_{hitung} sebesar 0.779, sedangkan untuk df 82 dengan taraf signifikansi 0.05, nilai r_{tabel} adalah sebesar 0.1807, maka H_0 ditolak. Berdasarkan uji hipotesis ini maka dapat

disimpulkan bahwa ada *hubungan yang kuat* antara pengetahuan kewarganegaraan dengan partisipasi politik mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang.

DAFTAR RUJUKAN

- Almond, G. A. (2000). Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik. In M. Mas'ood & C. McAndrews (Eds.), *Perbandingan Sistem Politik* (pp. 33–51). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Barrett, M. (2012). *The PIDOP Project: An Overview*. Retrieved September 12, 2019, from [http://epubs.surrey.ac.uk/775796/1/Barrett \(2012\).pdf](http://epubs.surrey.ac.uk/775796/1/Barrett%20(2012).pdf)
- Branson, M. S. (1999). No Title. Washington DC: Center for Civic Education. Retrieved from http://www.civiced.org/papers/articles_mb_june99.html
- Budiardjo, M. (1982). Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Pengantar. In M. Budiardjo (Ed.), *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai* (pp. 1–27). Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Carpini, D. M. X., & Keeter, S. (1996). *What Americans Know About Politics and Why It Matters*. New Haven: Yale University Press.
- Goldfinger, J., & Presley, J. (2014). *Educating Students for Political Engagement: A Guide to Implementation and Assessment for Colleges and Universities*. Washington DC: American Association of State Colleges and Universities.
- Gunawan, M. A. (2015). *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi, dan Sosial*. Yogyakarta: Parama Publishing. Retrieved from www.nuhamedika.com
- Hilburn, J., & Maguth, B. (2014). Spatial Citizenship Education: Civic Teachers' Instructional Priorities and Approaches. *The Journal of Social Studies Research*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2014.07.001>
- Kartono, K. (1996). *Pendidikan Politik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Kemenristekdikti, D. J. P. dan K. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- National Center for Education Statistics. (2011). *The Nation's Report Card: Civics 2010* (NCES 2011-466). Washington DC.
- Nugraheni, A. Y. (2017). Pengaruh Pengetahuan Politik dan Aktor Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Trimurti, Srandakan, Bantul pada Pilkada 2015. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 42–69. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/download/9324/9004>
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, R. D., Pancasilawan, R., & Fedriyansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015. *Social Work Jurnal*, 6(2), 154–272. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13209/6037>
- Riduwan, Rusyana, A., & Enas. (2012). *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 459–476. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1591>
- Saltmarsh, J. (2005). The Civic Promise of Service Learning. *Liberal Education*, 91(2), 50–55.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Stokamer, S. (2013). Pedagogical Catalysts of

- Civic Competence: The Development of a Critical Epistemological Model for Community-Based Learning. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 17(1), 113–122.
- Sudijono, A. (2014). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta: PT Malta Printindo.
- Supranto, J. (1986). *Pengantar Probabilita dan Statistik Induktif Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Torney-Purta, J., Cabrera, J. C., Roohr, K. C., Liu, O. L., & Rios, J. A. (2015). *Assessing Civic Competency and Engagement in Higher Education : and Directions for Next-Generation Assessment*. <https://doi.org/10.1002/ets2.12081>
- Utami, R. F. (2017). 6 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik. <https://doi.org/https://gurupkn.com/faktor-yang-mempengaruhi-partisipasi>
- van Deth, J. . (2016). *What is Political Participation? In Political Behavior, Political Sociology Online Publication*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.68>
- Zulganef. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis (Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.